

BAB II

CARA PEMILIHAN KEPALA NEGARA DI INDONESIA

A. Sejarah Pemerintahan Indonesia.

Pada tanggal 8 Maret 1942 Jepang memaksa Angkatan Perang Hindia Belanda, dan Belanda menyerah pada Jepang tanpa syarat di Kalijati. Sejak itu wilayah Indonesia di bawah kekuasaan pemerintah kedudukan Militer Jepang. Jiwa rakyat Indonesia yang selama penjajahan Belanda selalu berharap merdeka, penyerahan Hindia Belanda kepada Jepang tanpa syarat menyadarkan rakyat Indonesia bahwa kekuatan Belanda sebenarnya rapuh. Gejolak yang selama ini terpendam, akhirnya secara spontan meledak. Karena itu, dimana-mana terlihat sang merah putih berkibar dengan megahnya. Bala tentara Jepang membiarkan bangsa Indonesia untuk memuaskan gelora hatinya yang terkekang pada masa penjajahan Belanda, dan ini tidak berlangsung lama.

Tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang mengemukakan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Namun janji tersebut merupakan usaha Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia.

Kantor-kantor diperbolehkan untuk mengibarkan bendera merah putih, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang.

Tujuan Jepang terhadap bangsa Indonesia sebenarnya untuk bersama-sama melawan sekutu. Pulau-pulau yang telah dipertahankan oleh Jepang direbut dan diduduki tentara sekutu.

Indonesia dibangkitkan semangatnya, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi, bendera merah putih berkibar berdampingan dengan bendera Hinomaru, lagu Indonesia Raya mendapat izin dari Jepang untuk dinyanyikan. Segala usaha tersebut untuk menarik simpati bangsa Indonesia untuk mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan sekutu.

Panglima Bala tentara Dai Nippon terus memberikan janji kemerdekaan yang tidak kunjung tiba. Sehingga pada tanggal 29 April 1945, Pemerintah Jepang di Jakarta membentuk suatu badan yang diberi nama "Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai" atau yang lebih dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha persiapan Kemerdekaan. Dalam Badan ini duduk sejumlah pemimpin Indonesia, yang walaupun menggunakan siasat bekerja sama dengan Jepang, namun tetap pada cita-citanya untuk membelokkan tujuan tindakan-tindakan-

BPUPKI bersidang dua kali yaitu, pada sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 hingga tanggal 1 Juni 1945 dan terakhir ditutup pada tanggal 16 Juli 1945 di bawah pimpinan Dr. Radjiman Wediodiningrat.

Tujuan dibentuknya Badan ini menurut kemauan dari pihak Jepang, hanya menyelidiki persiapan Kemerdekaan yang waktu itu belum dapat dipastikan. Tetapi oleh para pemimpin bangsa, Badan Penyelidik ini dimanfaatkan untuk segera mewujudkan pembentukan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Dalam sidang yang pertama selama empat hari banyak pendapat mengenai Dasar Negara Indonesia. Pada sidang pertama ini BPUPKI telah mengusulkan konsepsi perumusan Dasar Negara, yaitu :

1. Konsep Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)
2. Konsep Mr. Soepomo (31 Mei 1945)
3. Konsep Bung Karno (1 Juni 1945)

Perumusan Dasar Negara ini atas usul Bung Karno bernama PANCASILA. Untuk memperlancar perjalanan pemerintahan itu maka dibentuk suatu Panitia Kecil yang ber

Pada sidang kedua selama tujuh hari, BPUPKI mem
bentuk tiga panitis, yaitu :

- Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI bersidang lagi
Panitia perancang UUD, melaporkan hasil karyanya, yaitu :

- Untuk melaksanakan Kemerdekaan yang telah diberikan oleh Jepang maka dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam istilah Jepang "Dokuritzu Junbi Inkai", PPKI disetujui oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945.

Kemudian Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta dan Radjiman Wediodiningrat, pada tanggal 9 Agustus 1945 ke Saigon untuk menghadap Terauchi, guna menerima sendiri Keputusan Marsekal tersebut tentang pembentukan PPKI. Kejadian ini diikuti dengan pengangkatan Ir. Soekarno sebagai ketua, Drs. Moh Hatta sebagai wakil ketua.

Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan tersebut, masih dirahasiakan. Pesawat radio disegel oleh Jepang sehingga masyarakat tidak dapat mendengar pemancar luar negeri, tetapi para pemuda yang bekerja pada kantor berita Domei, menyampaikannya kepada para pemimpin Indonesia.

Setelah terdengar kekalahan Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas dan lebih leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung pada Jepang.

Dengan adanya kekalahan dari pihak Jepang, maka timbullah satu permasalahan diantara pemimpin rakyat saat itu tentang pelaksanaan Proklamasi. Sebenarnya para pemimpin tersebut menghendaki agar Proklamasi dilaksanakan dengan segera, tetapi para pemuda tetap mendesak agar Proklamasi dilaksanakan tanggal 16 Agustus 1945. Sedang

para pemimpin tersebut perlu untuk mengadakan rapat PPKI terlebih dahulu. Perbedaan pendapat tersebut mendorong - para pemuda untuk menculik Soekarno dan Hatta.

Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 04.00 terjadi penculikan terhadap Soekarno dan Hatta. Tujuan penculikan ini karena golongan pemuda tidak menyukai hubungan yang terlalu erat antara kedua pemimpin bangsa dengan pihak Jepang. Maka mereka membuskan untuk mengamankan kedua tokoh tersebut.

Kedua tokoh bangsa tersebut dibawa ke Rengasdengklok beserta keluarga dari Soekarno yakni istrinya, Fatmawati. Di tempat tersebut terjadi dialog antara Sukarni, Singgih dari golongan pemuda dengan Soekarno sedangkan Hatta diluar ruangan. Dialog tersebut mewakili golongan pemuda agar Soekarno segera memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Namun pembicaraan tersebut tidak membawa hasil sebab Soekarno tetap pada pendiriannya bahwa Proklamasi harus dilaksanakan oleh PPKI.

Sementara itu di Jakarta Ahmad Subardjo dengan Wikana bersepakat, Proklamasi harus dilaksanakan di Jakarta. Atas dasar kesepakatan antara pemimpin bangsa yang berada di Jakarta dengan kaum pemuda, maka Ahmad Subardjo menjemput Soekarno beserta istrinya, serta Hatta

Setelah sampai di Jakarta kemudian Soekarno dan Hatta tetap bertekad untuk mengadakan rapat PPKI, yang gagal dilaksanakan 16 Agustus 1945, sesuai dengan penegasan Jenderal Terauchi yang menyerahkan kemerdekaan Indonesia kepada PPKI sedang tentara Jepang tidak boleh mengubah status Quo, oleh karena itu Nishimura (Kepala Pemerintahan umum Jepang) melarang Soekarno - Hatta untuk mengadakan rapat PPKI untuk melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan. Maka Soekarno - Hatta berkesimpulan bahwa Proklamasi Kemerdekaan tidak perlu lagi dibicarakan dengan Jepang.

Ir. Soekarno, Hatta dan Ahmad Subardjo menuliskan konsep Proklamasi. Setelah ketiga tokoh telah selesai merumuskan naskah Proklamasi, Soekarno membacakan konsep Proklamasi tersebut kepada hadirin yang hadir saat itu .

Kepada yang hadir Soekarno menyarankan agar bersama-sama menandatangani naskah Proklamasi sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun usul tersebut ditentang oleh pihak pemuda, dan Sukarni selaku wakil dari golongan pemuda mengusulkan agar yang menandatangani naskah tersebut cukup Soekarno dan Hatta. Karena kedua tokoh tersebut dapat mewakili bangsa Indonesia, sebab keduanya di

Setelah naskah tersebut diketik, naskah Proklamasi yang resmi dan otentik ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, kemudian setelah penandatanganan naskah tersebut maka pada tanggal 17 Agustus 1945, dibacakan oleh Soekarno, pada jam 10.00 pagi.

1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kemudian disebut sebagai Undang-undang Dasar 1945.
2. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama dan Drs. Moh Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama.
3. Sebelumnya terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat s e r t a Dewan Pertimbangan Agung, Presiden dalam melaksanakan tugasnya dan kewajibannya maka untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional

B. Cara Pemilihan Kepala Negara di Indonesia.

Apabila kita lihat kembali sejarah ketatanegaraan di Indonesia maka akan diketahui bahwa UUD 1945 pernah diganti dengan Undang-undang Dasar yang lain, yakni Undang-undang Dasar 1949 atau Konstitusi Sementara RIS

Sebelum melangkah pada tata cara pemilihan Kepala Negara, sebaiknya kita tinjau ulang tentang sejarah UUD 1945 dalam gerak pelaksanaannya.

Akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia namun bangsa Indonesia terpaksa menerima berdirinya negara Indonesia yang lain. Sehingga Negara Kesatuan berubah menjadi Negara Federasi Republik Indonesia Serikat.

Negara Federasi RIS ini hanya berjalan sebentar dan pada tanggal 17 Agustus 1950 negara RIS kembali menjadi negara Kesatuan RI, tetapi sebagai landasan bukan lagi UUD 1945 melainkan UUDS 1950 atau Undang-undang Dasar Sementara. Menurut UUDS 1950 ini sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem kabinet parlementer. Isi UUDS 1950 hampir sama dengan isi konstitusi RIS. Perbedaannya hanya dalam hubungan dengan penggantian bentuk negara Federasi menjadi bentuk negara kesatuan dengan konsekwensi-konsekwensinya.

Perbedaan lainnya ialah adanya suatu Badan yang bernama konstituante yang bertugas membentuk Undang-undang Dasar baru. Konstituante ini berusaha melaksanakan dengan baik, namun tidak berhasil. Maka pada tahun 1959 Presiden Soekarno mengusulkan agar kembali kepada UUD 1945.

Usul ini sudah mendapat mayoritas suara, tetapi kurang dari dua pertiga dari jumlah suara yang diperlukan untuk membentuk Undang-undang Dasar baru. Kemudian sebagian terbesar anggota-anggota Konstituante menyatakan ini tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya. (Dr. Wirjono Prodjodakoro, SH 1983 : 30).

Pada pemilihan Kepala Negara tahun 1945 tepatnya setelah Indonesia diprdklamirkan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, pemilihan Kepala Negara untuk yang pertama dipilih secara aklamasi oleh PPKI. Hal ini berdasarakan pada pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, pada pasal III tersebut menyatakan bahwa untuk pertama kalinya Presiden dipilih oleh PPKI. Pemilihan ini berlangsung pa da tanggal 18 Agustus 1945.

Pemilihan tersebut dilakukan secara aklamasi, dan yang terpilih sebagai Presiden RI yang pertama adalah Ir. Soekarno dan sebagai Wakil Presiden RI yang pertama terpilih Drs. Moh Hatta, karena kedua tokoh ini telah dikenal rakyat Indonesia sebagai tokoh utama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia serta kedua tokoh inilah yang merupakan wakil rakyat Indonesia untuk menandatangani dan memproklamlirkan naskah Proklamasi, dari kenyataan inilah PPKI melihat keberanian dan kemampuan kedua tokoh ini untuk memimpin negara Indonesia yang baru saja lahir.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa negara Indonesia mengalami perubahan konstitusi pada tahun 1949. Pada konstitusi ini terdiri dari 197 pasal, dan

terdiri 6 Bab. Pada bab III bagian I termuat tentang pemerintahan, yang dimaksud pemerintah dalam konstitusi ini adalah Presiden. Sebagaimana dalam pasal 68 ayat 2 UUD RIS 1949 yang berbunyi : "Dimana-mana dalam konstitusi ini disebut Pemerintah, maka yang dimaksud ialah Presiden".

Pada pasal 69 ayat 2 UUD RIS 1949 tertulis bahwa seorang Kepala Negara dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian tersebut di dalam pasal 2 UUD RIS 1949. Dalam memilih Presiden, orang-orang yang dikuasakan itu berusaha mencapai kata sepakat (pasal 69 ayat 2 UUD RIS 1949). Untuk memenuhi pasal 69 ayat 2 UUD 1949 tersebut maka pada tanggal 16 Desember 1949 telah diadakan pemilihan Presiden RIS untuk pertama kalinya dilakukan oleh wakil dari pemerintah negara/bagian yang dimaksud dalam pasal 2 UUD RIS 1949. Dari hasil pemilihan ini dengan suara bulat terpilih Ir. Soekarno yang pada saat itu juga masih menjabat sebagai Presiden RI, untuk menjadi Presiden RIS, dan Drs. Moh Hatta yang memimpin kabinet berfungsi sebagai Perdana Menteri. (Joe-niarto, SH, 1986 : 68).

Setelah terpilihnya Ir. Soekarno sebagai Presiden RIS, maka sebelum menjalankan tugasnya haruslah disumpah terlebih dahulu dihadapan orang-orang yang dikuasakan di

dalam pasal 2 UUD RIS 1949, hal ini tertulis pada pasal 71 UUD RIS 1949.

Presiden RIS disumpah di Yogyakarta, kemudian dibentuk pula kabinet RIS yang pertama dengan Moh Hatta sebagai Perdana Menteri merangkap menteri luar negeri pada tanggal 19 Desember 1949.

Negara RIS terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949 dengan diserahkannya kembali kedaulatan atas Indonesia dari kerajaan Belanda. Sejak tanggal 27 Desember 1949, RI yang pada mulanya meliputi wilayah bekas Hindia Belanda dan kemudian dikurangi wilayahnya melalui persetujuan Linggarjati dan kemudian persetujuan diatas kapal Renville telah menjadi negara bagian di dalam RIS dan pada tanggal 16 Januari 1950 dibentuk kabinet RI sebagai negara bagian. (Drs, Musanef, Gunung Agung : 42).

Persetujuan Konferensi Meja Bundar dianggap tidak sejalan dengan cita-cita rakyat Indonesia dan tidak sesuai dengan jiwa Proklamasi Kemerdekaan RI, dan dari KMB ini terdapat ikatan uni Indonesia - Belanda dan di atasnya Mahkota Belanda, sehingga dari hasil tersebut membulatkan tekad bangsa Indonesia untuk kembali ke negara kesatuan dan meleburkan negara-negara bagian menjadi satu negara bagian.

Mengenai pemilihan Presiden Undang-undang Dasar 1950 menyebutkan : " Presiden dan Wakil Presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang(pasal 45 ayat 3), tetapi pada waktu Undang-undang Dasar ini dibuat, Undang-undang yang diperlukan itu belum ada, karena itu tidak mungkinlah mengadakan pemilihan itu. Mengenai hal ini sebagai telah kita lihat, Piagam Persetujuan 19 Mei 1950 antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia menetapkan bahwa Ir. Soekarno akan menjadi Presiden dari Negara Kesatuan yang akan didirikan itu. Persetujuan ini kemudian terbukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 141 Undang-undang Dasar 1950 yang antara lain menentukan bahwa pejabat-pejabat yang sudah ada sebelum Undang-undang Dasar 1949 diroboh, akan tetap memegang jabatannya sampai diganti yang lain menurut Undang-undang Dasar 1950. Karena itulah pada waktu berdirinya Negara Kesatuan tidak diadakan Pemilihan Presiden (Prof. Dr. Ismail Suny, SH, MCL, 1986 : 129).

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD 1945 telah kembali menjadi UUD rakyat Indonesia, namun bukan berarti negara Indonesia sudah tidak lagi mengalami pergolakan lagi. Kembali ke UUD 1945 terutama didorong oleh harapan timbulnya kestabilan politik serta pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Di dalam MPR dan DPR terdapat Menteri, pembedangan menjadi serba rumit. Kekuasaan berada dalam satu tangan, sehingga MPR maupun DPR seperti kehilangan kemauan yang asli. Keruwetan lalu memuncak dengan adanya pemberontakan G 30 S/PKI pada tanggal 30 September 1965 malam dengan pembunuhan beberapa Jenderal sebagai Pahlawan revolusi.

Sehingga untuk mengembalikan kembali keadaan seperti semula, Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Pangad. Let. Jend. Soeharto untuk menstabilkan kembali negara Indonesia. Surat Perintah tersebut yang dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar) tahun 1966.

Kemudian pada tanggal 12 Maret 1966 Pangad atas nama Presiden membubarkan PKI dengan segala bentuk organisasinya sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

Super Semar tersebut mempunyai kekuatan hukum dan politis setelah tanggal 21 Juni 1966. Kemudian Presiden

Soekarno mengeluarkan pengumuman tentang penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada Pangad. Let, Jend. Soeharto selaku pengemban Super Semar dengan tidak mengurangi maksud dan Jiwa UUD 1945.

MPRS juga menegaskan, bahwa apabila Presiden berhalangan maka pemegang Super Semar memegang Jabatan Presiden, demikian bunyi Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966, di dalam pasal 2 ayat (1). Sedang dalam pasal 3 pada Ketetapan ini berbunyi : "Dalam hal terjadi yang disebut dalam pasal 8 Undang-undang Dasar 1945 maka MPRS segera memilih pejabat Presiden yang bertugas sampai dengan terbentuknya MPR hasil Pemilihan Umum". Pada saat itu tidak ada jabatan wakil Presiden, semenjak Wakil Presiden Drs. Moh Hatta mengundurkan diri dari jabatannya pada bulan Desember 1957, maka jabatan Wakil Presiden menjadi terlowong. Kemudian menurut Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 tentang Pemilihan/penunjukkan Wakil Presiden dan tata cara pengangkatan pejabat Presiden, MPRS menganggap lebih baik tidak mengisi lowongan jabatan Wakil Presiden dan oleh karena itu pula MPRS tidak mengadakan pemilihan Wakil Presiden, hingga terbentuknya MPR hasil Pemilu tanggal 3 Juli 1971.

Maka sejak itu setiap lima tahun sekali MPR memi -

a. Syarat-syarat Calon Kepala Negara menurut Ketetapan -
MPR No II/MPR/1973.

Pada Ketetapan MPR No. II/MPR/1973, pasal 1 Bab I tertulis tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi calon Kepala Negara. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Telah berusia 40 tahun.
3. Bukan orang yang sedang dicabut haknya untuk di pilih dalam Pemilihan Umum.
4. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5. Setia kepada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila dan UUD 1945.

6. Bersedia menjalankan Haluan Negara menurut Garis besar yang telah ditetapkan dan diputuskan Majelis
7. Berwibawa.
8. Jujur.
9. Cakap.
10. Adil.
11. Dukungan dari rakyat yang tersermin dalam Majelis.
12. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati-Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar-kan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seper-ti gerakan G 30 S/PKI dan/atau Organisasi terla-rang lainnya.
13. Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan Keputus-an Pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi kare-na tindak pidana yang diancam pidana sekurang-ku-rangnya 3 tahun.
14. Tidak terganggu jiwanya.
15. Tidak terganggu jiwanya.

b. Quorum Rapat Paripurna untuk Pemilihan Kepala Negara.

Rapat Paripurna ini untuk memilih seorang Kepala Negara dari warga negara yang dinyatakan lolos dalam persyaratan yang telah ditentukan tersebut. Pada Rapat ini

diatur dalam Bab II mulai pasal 3 hingga pasal 7 dalam
Ketetapan MPR No. II/MPR/1973, yang menyatakan sebagai
berikut :

Dalam pasal 3 Ketetapan ini menyatakan bahwa Rapat Paripurna harus dihadiri oleh semua Anggota Majelis, se kurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Majelis.

Apabila dalam Quorum Rapat Paripurna ini dihadiri kurang dari $\frac{2}{3}$ jumlah Anggota Majelis maka Quorum Rapat Paripurna untuk pemilihan Kepala Negara ini dapat ditunda hingga tiga kali berturut-turut dan tiap kali penundaan paling lama satu jam (pasal 4).

Apabila sampai penundaan yang ketiga kalinya dan jumlah dari Anggota masih kurang dari $\frac{2}{3}$ dari jumlah Anggota Majelis, maka Quorum Rapat Paripurna ini di tunda paling lama dalam waktu 2 x 24 jam, terdapat dalam pasal-5.

Sedang dalam pasal 6 termuat tentang jika penundaan selama 2 x 24 jam tersebut juga belum mencapai Quorum Rapat Paripurna, maka Quorum Rapat Paripurna ini menjadi dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari separoh jumlah

Apabila dalam jumlah separoh dari jumlah Anggota Majelis ini belum mencapai dalam Rapat Quorum, maka Pimpinan Majelis wajib untuk mencari jalan keluar untuk dibawa dalam Quorum Rapat Paripurna Pemilihan Kepala Negara pada masa persidangan, terdapat dalam pasal 7.

Dalam bab ini banyak terdapat tulisan atau kata Majelis, yang dimaksud dalam hal ini adalah MPR. Sebagai mana dalam Ketetapan ini pada bab VI Ketentuan Penutup pasal 29, yang berbunyi : "Majelis yang dimaksud dalam Ketetapan ini ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Seorang calon Kepala Negara yang diusulkan oleh Fraksi secara tertulis yang kemudian disampaikan kepada Pimpinan Majelis. Kemudian Pimpinan Majelis tersebut akan mendatangi calon tersebut untuk menanyakan kesanggupannya untuk menjadi Kepala Negara. Hal ini tertulis di dalam bab III pasal 2 ayat (2) masih dalam Ketetapan ini. Apabila yang bersangkutan tersebut menyatakan tidak sanggup untuk mengemban jabatan Kepala Negara, maka tidak dapat melanjutkan pada tahap berikutnya, dan jika yang

bersangkutan tersebut menyatakan kesanggupannya untuk mengemban sebagai Kepala Negara maka calon tersebut dapat diusulkan melalui Pimpinan Majelis secara tertulis. Penyampaian usul tersebut selambat-lambatnya 24 jam sebelum Rapat Paripurna ini berlangsung. Hal ini terdapat dalam pasal 10.

Setelah Pimpinan Majelis meneliti tentang calon Kepala Negara tersebut, kemudian Pimpinan Majelis mengumumkan tentang nama calon Kepala Negara yang telah memenuhi syarat sebagai calon Kepala Negara pada Quorum Rapat Paripurna (pasal 11).

Pada pasal 12 tertuang bahwa apabila dalam pencalonan ini yang bersangkutan mengundurkan diri untuk dipilih sebagai seorang Kepala Negara maka pencalonan tersebut dapat ditarik kembali. Pengunduran diri tersebut diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Majelis melalui Pimpinan Fraksi Pengusul atau Fraksi yang mengusulkan.

Jika tim Fraksi mengajukan calon Kepala Negara lebih dari satu orang terdapat dalam pasal 13, yang menyatakan apabila tim Fraksi mengajukan lebih dari satu orang maka Fraksi harus melakukan pemungutan suara yang dilakukan secara rahasia untuk menentukan satu calon Kepala Negara.

Dalam hal melakukan pemungutan suara, apabila Fraksi mencalonkan lebih dari satu orang, putusan diambil dari persetujuan sekurang-kurangnya lebih dari separoh jumlah Anggota Majelis yang hadir, terdapat dalam pasal 14.

Dalam perhitungan suara ternyata tidak ada calon yang mendapatkan suara lebih dari separoh sebagai yang terdapat diatas sesuai yang dimaksud maka putusan diambil berdasarkan jumlah suara terbanyak diantara dua calon tersebut (pasal 15).

Apabila dari perhitungan atas pemungutan suara tersebut, ternyata masing-masing calon mendapatkan jumlah suara yang sama banyaknya, maka pemungutan suara tersebut diulang secara rahasia. Demikian bunyi dalam pasal 16.

Sedang pada pasal 17 jika pada pasal 16 ternyata masing-masing calon mendapatkan suara yang sama banyaknya maka pemungutan diulang secara rahasia.

Apabila masing-masing calon tetap mendapatkan suara

yang sama banyaknya maka pemungutan suara dilakukan berdasarkan kehadiran wakil-wakil dari Fraksi yang membawa jumlah suara yang dilakukan, dan ternyata apabila masing-masing calon mendapat jumlah suara yang sama banyaknya, maka Fraksi mengusulkan calon yang lain (pasal 18 dan pada pasal 19).

Pada pasal 20 Ketetapan ini menjelaskan tentang apabila dari hasil Rapat Paripurna tersebut sudah terpilih seorang Kepala Negara yang baru, maka sebelum mengembankan tugasnya Kepala Negara yang baru tersebut bersumpah atau berjanji dihadapan Majelis. Demikian pula pada pasal 9 UUD 1945, yang berbunyi : "Sebelum memegang jabatan nya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai berikut...".